



Arahan Menteri Sosial RAPAT KOORDINASI NASIONAL DINAS SOSIAL SE INDONESIA

Saifullah Yusuf
Menteri Sosial Republik Indonesia

- disampaikan dalam rangka Pembukaan Rakornas Dinas Sosial se Indonesia terkait Implementasi DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

DASAR HUKUM

UUD '45

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran

Pasal 31, ayat (1), UUD '45

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Pasal 34, UUD '45

Undang-Undang

Pasal 5, UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

“Penanganan Fakir Miskin dilakukan dengan **Terarah, Terpadu, Berkelanjutan** oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat”

Pasal 7, Ayat (1), UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

“Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: Pengembangan Potensi Diri; bantuan pangan dan sandang; penyediaan pelayanan perumahan; penyediaan pelayanan kesehatan; **penyediaan pelayanan pendidikan**; penyediaan akses kesempatan kerja danberusaha; bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial”.

Pasal 1, ayat (1), UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi **terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial** warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Instruksi Presiden

INPRES 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

INPRES 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



TENTANG DTSEN

“

Negara harus hadir dengan data yang akurat, valid, dan menyatu, agar tidak ada lagi rakyat kecil yang tercecer dari hak-haknya.

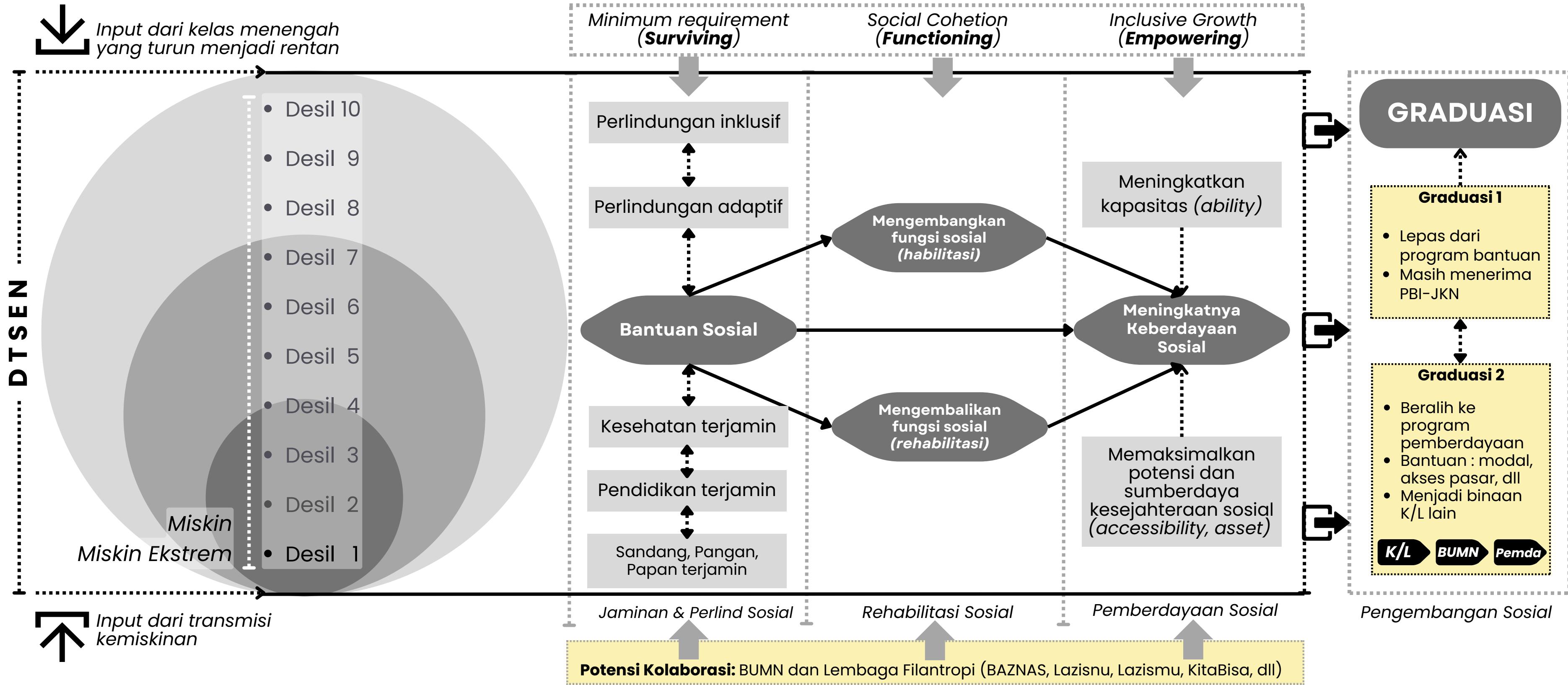
Bahwa setiap rupiah bantuan, setiap program pemberdayaan, setiap langkah kebijakan kesejahteraan sosial, harus sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah

”

BISNIS PROSES PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#KEMEN SOS
SELALU ADA

Pendekatan: "Terarah, Terpadu dan Berkelanjutan"



INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2025

Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional



Tugas Kementerian Sosial

Melakukan **sinkronisasi Bersama Badan Pusat Statistik** untuk mendukung pemutakhiran data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam **penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial**.

Peran Pemerintah Daerah

- Mendukung Proses Pemutakhiran Data, melalui **ground check** dan penetapan usulan;
- Bersama BPS dan Pendamping Desa, melakukan verifikasi lapangan atas usulan/perubahan DTSEN;
- Menerima pengaduan atas usulan dan sanggahan dari masyarakat terkait perubahan DTSEN;
- **Manfaatkan DTSEN untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



SALINAN

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

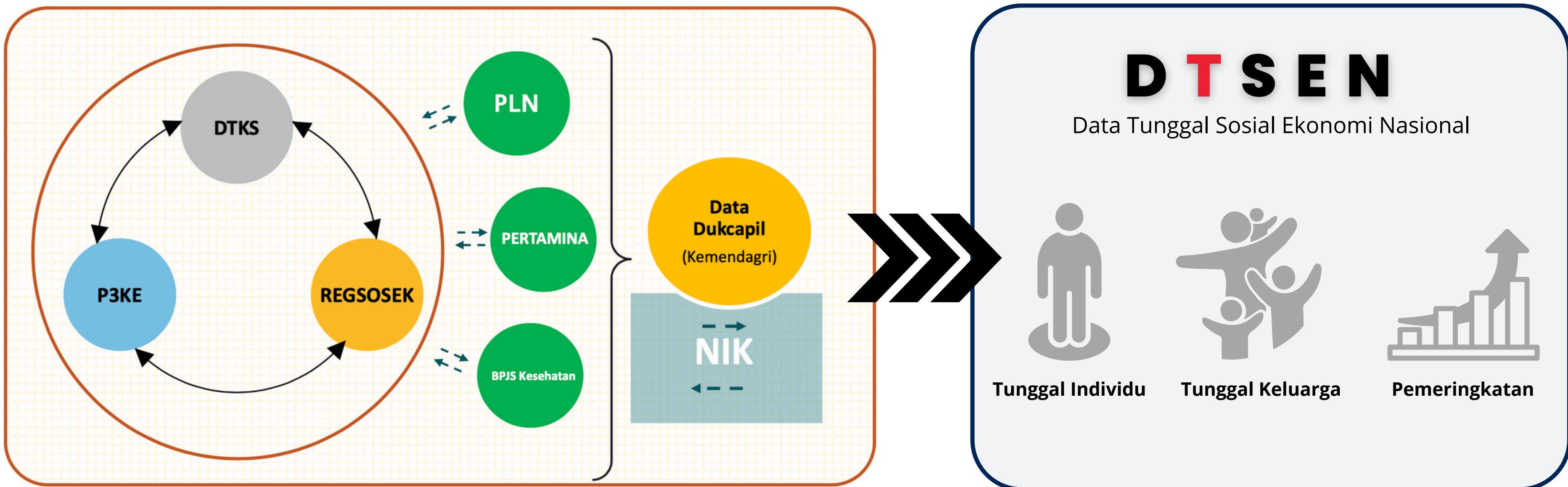
1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Pala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Digital; Negara dan Reformasi



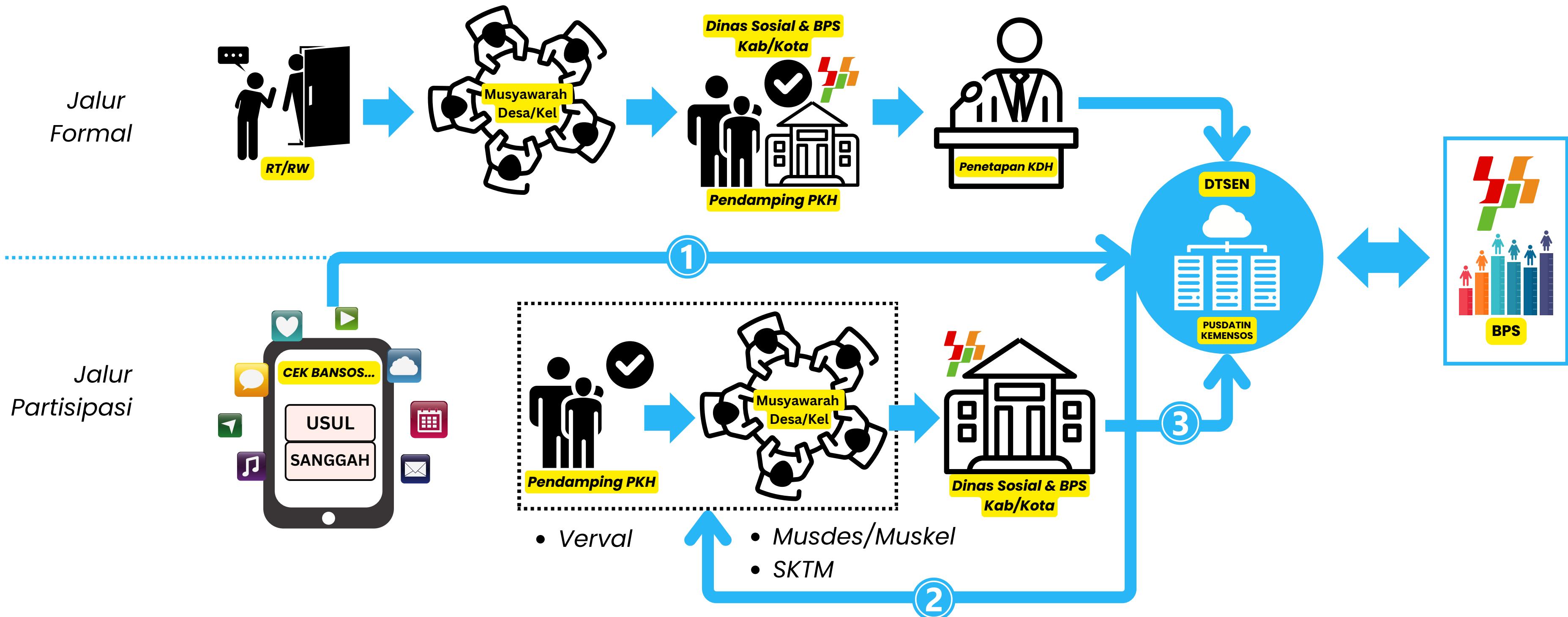
APA ITU DTSEN...?

“...adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.”

“...digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan...”



BAGAIMANA DTSEN DIMUTAKHIRKAN..?





KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

1 Pemeringkatan (Desil)

- **Dinamis:** Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data;
- **Inclusion Errors:** mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (desil atas);
- **Exclusion Errors:** mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah);

2 Penerima Bansos Berubah

- Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan;
- **Siapa yang keluar:** *inclusion errors*, masuk daftar negative list, yang bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi);
- **Siapa yang masuk:** exclusion errors, dan yang sesuai dengan kriteria program;

3 Kuota Bansos Daerah Berubah

- **Kuota bansos Nasional tidak berubah:** 10 juta PKH, 18,3 Juta Sembako, 96 Juta PBI-JKN
- Distribusi **kuota daerah berubah:** mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah, semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos (azas keadilan);

$$\left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nasional}} \times 100\% \right] \times \text{Kuota Bansos}$$

- Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang;

contoh PBI-JKN :

- dikeluarkan **7.397.277 Jiwa**
 - **2.306.943** karena berada pada desil 6-10
 - **5.090.334** karena berada diluar DTSEN
- dialihkan kepada mereka yang berada pada desil 1-4, sesuai kuota daerah;

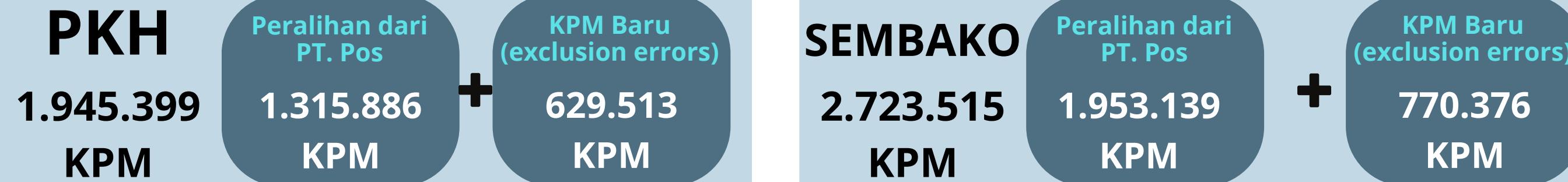
REALISASI BANTUAN SOSIAL (PKH & SEMBAKO/BPNT) TRIWULAN 2

01 TELAH DISALURKAN

per 7 Juli 2025

Bantuan	Kuota (KPM)	Tersalur (KPM)	Nilai (Rp)	Burekol	Sisa Transfer
Sembako	18.277.083	15.481.880 (84,71%)	9.289.128.000.000	2.723.515	71.688*
Penebalan	18.277.083	15.481.880 (84,71%)	6.192.752.000.000	2.723.515	71.688*
PKH	10.000.000	8.108.740 (81,08%)	5.850.035.975.000	1.886.522	4.738*

02 BUKA REKENING KOLEKTIF (BUREKOL)

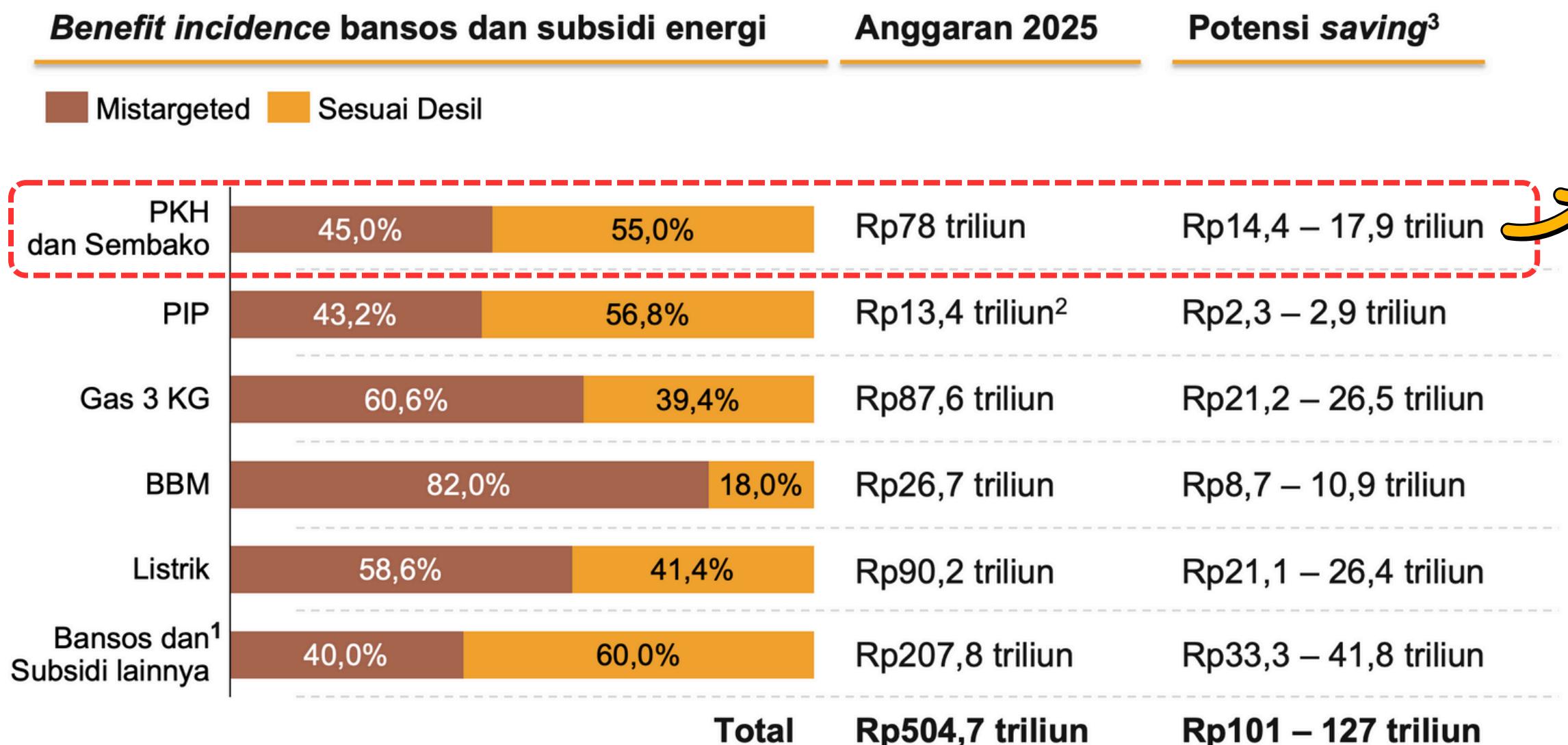


UPAYA PENYALURAN BANSOS TEPAT SASARAN

EXERCISE YANG DILAKUKAN KEMENOS :

POTENSI EFISIENSI JIKA SUBSIDI DAN BANSOS TEPAT SASARAN

Sumber: DEN, 2025

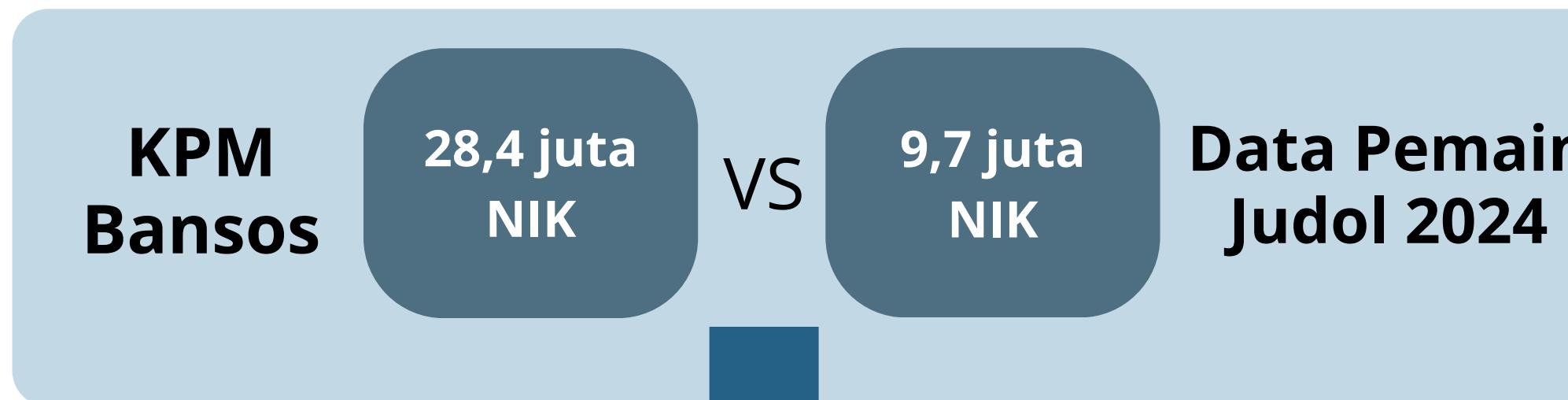


Catatan: 1) Terdiri dari bansos dan subsidi non-energi lainnya, tingkat mistargeted merupakan asumsi, 2) Berdasarkan realisasi 2024, 3) Merupakan asumsi potensi saving berdasarkan peningkatan efisiensi berkisar 40% - 50%

Sumber: Estimasi SUSENAS Maret 2024, Kemensos, kemendikdasmen, Nota Keuangan RAPBN TA 2025

- Menggunakan desil (pemeringkatan) status sosial ekonomi pada DTSEN untuk menetapkan prioritas penerima Bansos;
- Melakukan **Ground Check (GC)** terhadap yang diduga *inclusion/exclusion errors* dan NIK tidak aktif, untuk mengetahui kebenaran kondisi di lapangan;
- Hasil pemutakhiran DTSEN oleh BPS dengan memperhatikan hasil GC ditemukan KPM tidak layak menerima Bansos :
 - 616.367 KPM PKH
 - 1.286.066 KPM Sembako
 - Total = **1.902.433 (*inclusion errors*)**
- 1.902.433 tersebut dikeluarkan dan digantikan oleh:
 - **1.000.000 KPM** desil 1 **komplementaritas** / penerima salah satu (PKH/Sembako)
 - **902.433 KPM** dari desil 1 yang sudah di **(exclusion error)**

PENGUJIAN CEPAT TELAH DILAKUKAN DENGAN MEMADANKAN DATA NIK DARI KPM PENERIMA BANSOS DAN NIK PEMAIN JUDOL :



2% orang penerima bansos adalah pemain judol tahun 2024

terdapat 7,5 jt transaksi dengan nilai Rp. 957 Miliar

Sumber: PPATK, 2025



TEMPO [Menu](#) [Harian](#) [Mingguan](#) [Tempo Plus](#)

[Hukum](#) Hukum Perilaku Kriminal

PPATK: 550 Ribu Penerima Bansos Aktif Bermain Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 550 ribu orang penerima bantuan sosial pada 2024 aktif bermain judi online.

5 Juli 2025 | 17.07 WIB



A man wearing glasses and a red batik shirt is speaking into a microphone at a podium. The background shows a blurred audience and a red and white flag.

Perbesar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan



BAGAIMANA DAERAH MENDAPATKAN DTSEN..?



Melalui mekanisme bagi pakai data

- Mekanisme diatur oleh Bappenas (sesuai inpres 4/2025);
- PermenPPN terkait Bagi-Pakai DTSEN sedang tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum;
- Pemda (melalui wali data daerah) dapat mengajukan Penggunaan dan Pemanfaatan DTSEN melalui portal Satu Data Indonesia ;



Melalui mekanisme pemadanan data

- Mekanisme diatur oleh Kemensos (Permensos 3/2025 ttg Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bansos, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- Pemda mengajukan pemadanan data (BNBA) kepada Pusdatin Kemensos;
- Kemensos akan memberikan data balikan DTSEN sesuai kebutuhan;



“

**Tugas kita bukan hanya mengumpulkan data.
Tugas kita adalah menghidupkan data dengan kejujuran,
merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya
dengan hati nurani.**

”

TENTANG SEKOLAH RAKYAT

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Tugas Kementerian Sosial

- membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;
- menyiapkan dan menyusun kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter;
- menyiapkan sarana prasarana dan asrama sekolah rakyat
- membentuk tim formatur untuk sekolah rakyat

Tugas Pemerintah Daerah

mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama dengan ini antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Kesehatan;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

SALINAN

Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk Memuliakan Orang Miskin

#KEMENSOS
SELALU ADA :::::



“KESAMAAN”



“KESETARAAN”



2 JENIS SEKOLAH RAKYAT



Sekolah Rakyat Rintisan



Sekolah Rakyat Permanen

LOKASI SEKOLAH RAKYAT

TAHAP 1



100

Lokasi
Sekolah
Rakyat

Tahap 1a



63

titik
operasional
Juli

Tahap 1b



37

titik
operasional
Juli

256



6.130

Rombel

- 3 Rombel SD
- 112 Rombel SMP
- 141 Rombel SMA



139

Rombel



3.625

Siswa

- 75 siswa SD
- 2.800 siswa SMP
- 3.225 siswa SMA

- 4 Rombel SD
- 53 Rombel SMP
- 82 Rombel SMA

- 100 siswa SD
- 1.310 siswa SMP
- 2.215 siswa SMA



9.755

SISWA



1.554

GURU



3.390

TENDIK

Perencanaan Tahap 2

TAHAP 2



202

Potensi
Lokasi

Tahap 2a



51

BLK
Kemenaker
Layak

Tahap 2b



45

Pemda
Layak

217



5.375

Rombel

- 105 Rombel SD
- 36 Rombel SMP
- 76 Rombel SMA

- 2.595 siswa SD
- 900 siswa SMP
- 1.180 siswa SMA

- 90 Rombel SD
- 73 Rombel SMP
- 43 Rombel SMA

- 1.250 siswa SD
- 1.800 siswa SMP
- 1.075 siswa SMA



10.425

TARGET SISWA



2.180

GURU



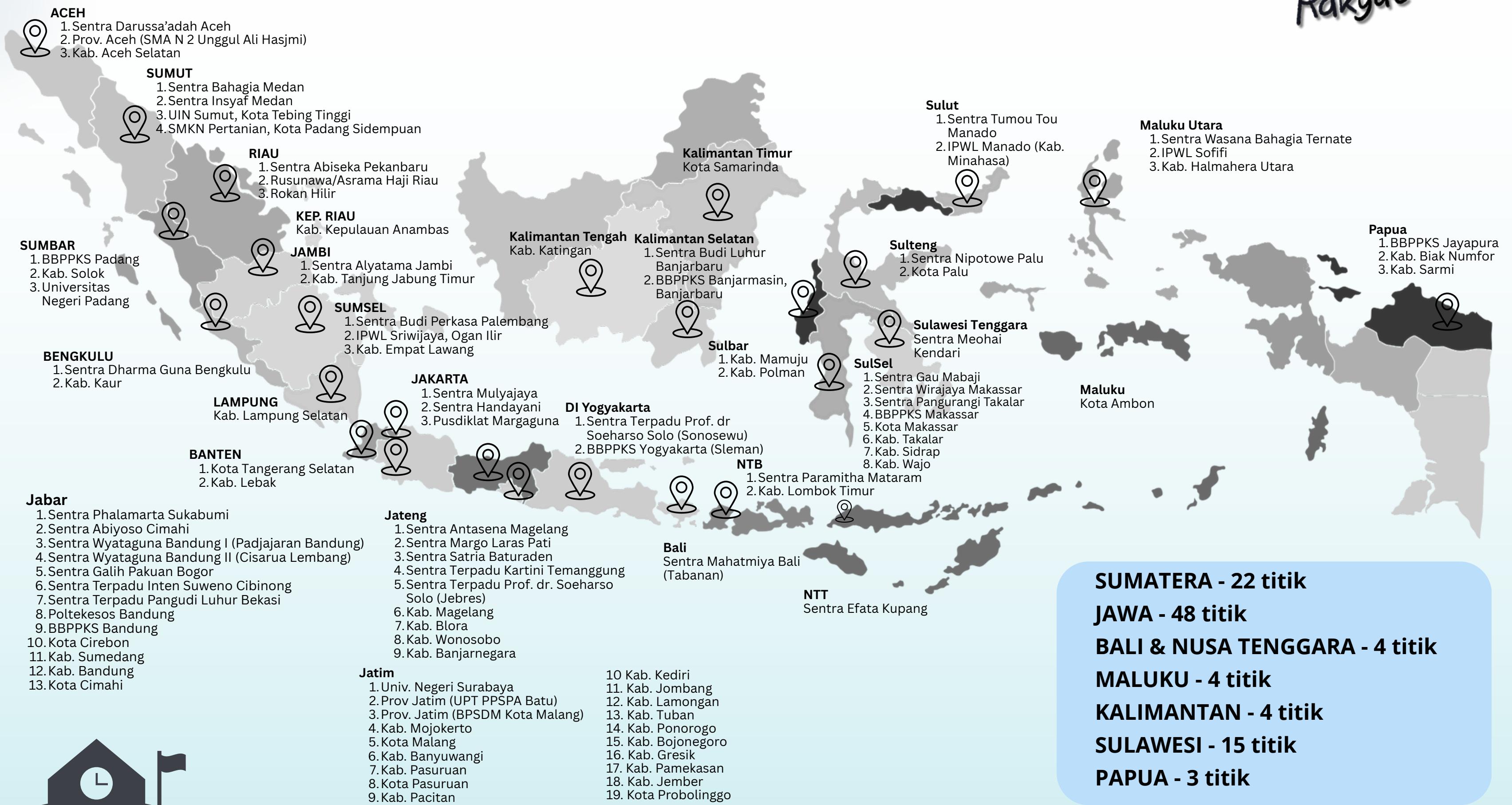
4.069

TENDIK

SEBARAN LOKASI 100 TITIK SEKOLAH RAKYAT

Sekolah
Rakyat

#KEMENSO
SELALU ADA



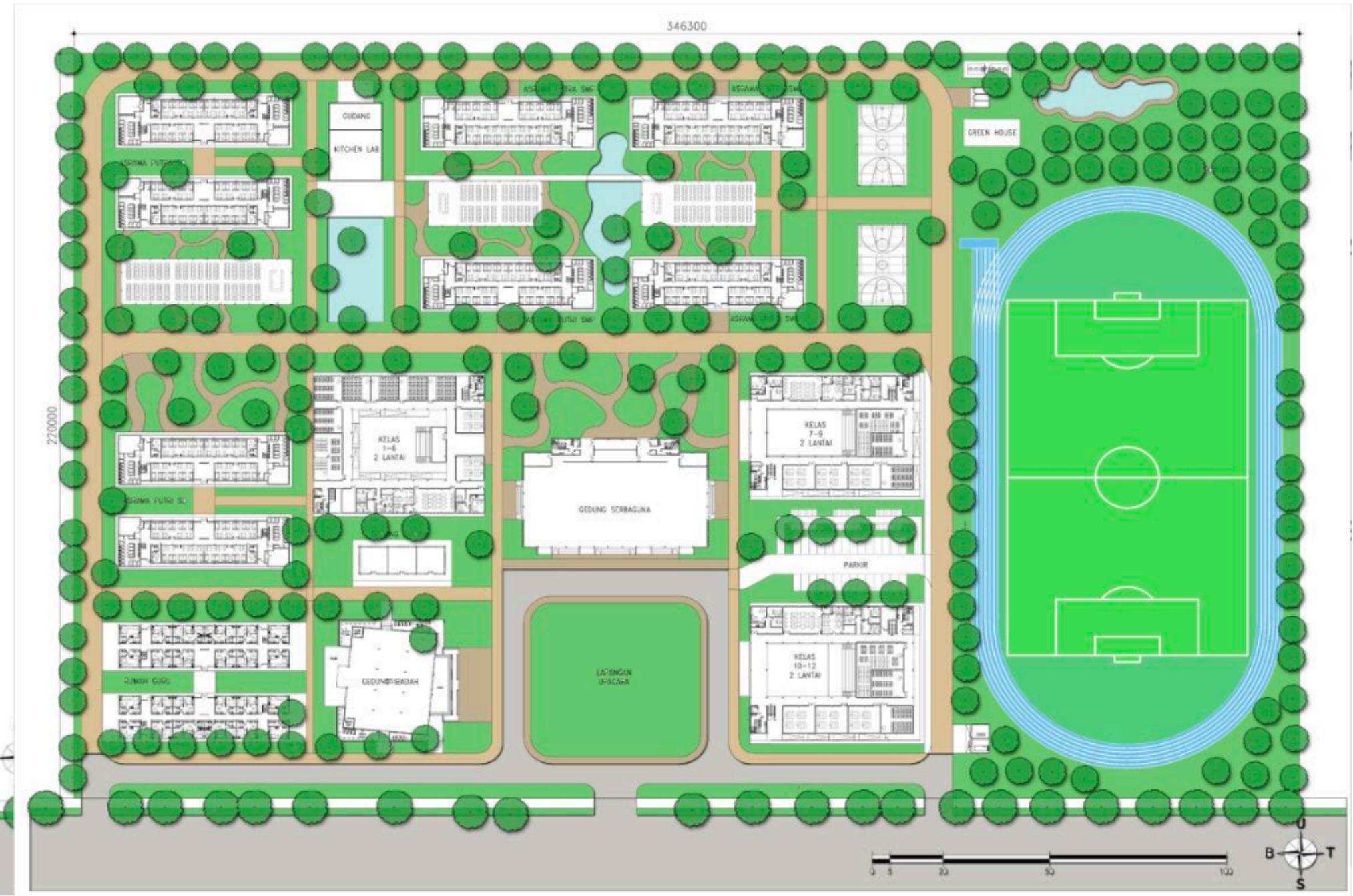
Gambaran Site Plan Sekolah Rakyat

Luas 6,38 Ha



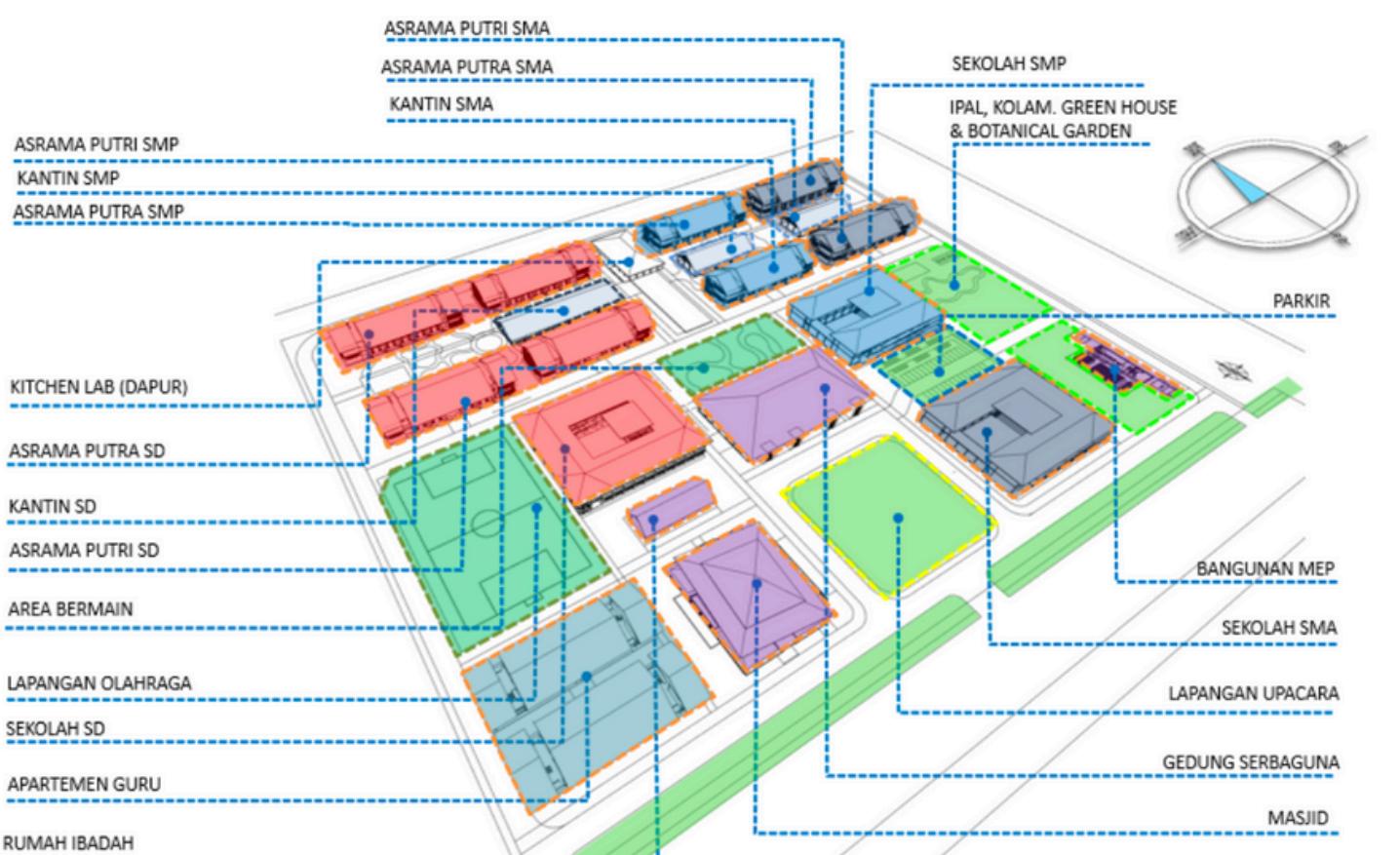
SITE PLAN

Luas 7,62 Ha



SITE PLAN

Gambaran Prototipe Sekolah Rakyat



SEKOLAH SD



SEKOLAH SMP

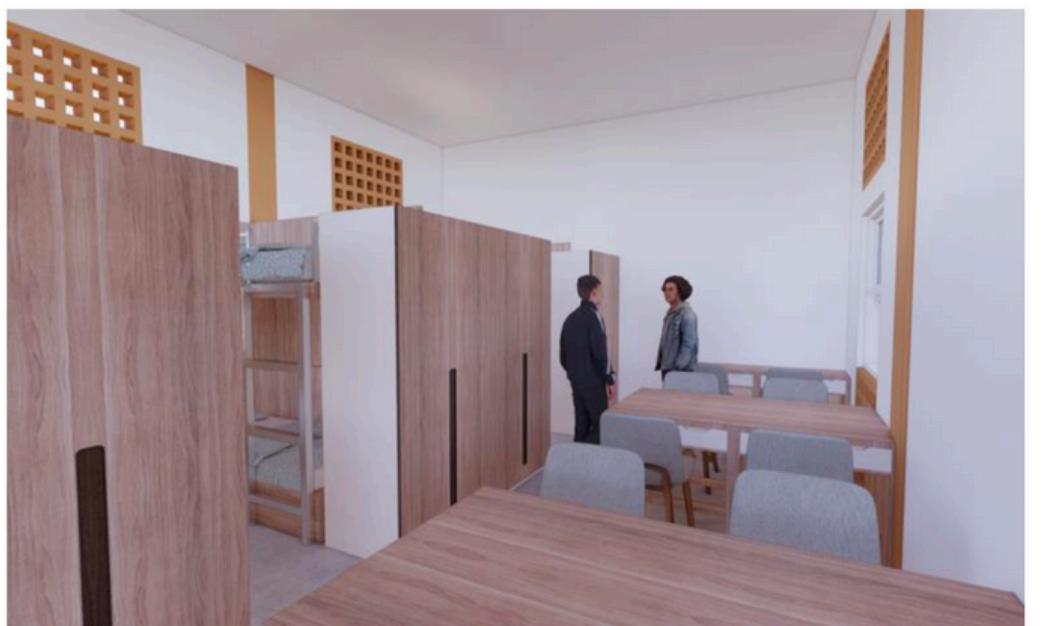


GEDUNG IBADAH (MASJID)

SEKOLAH SMA

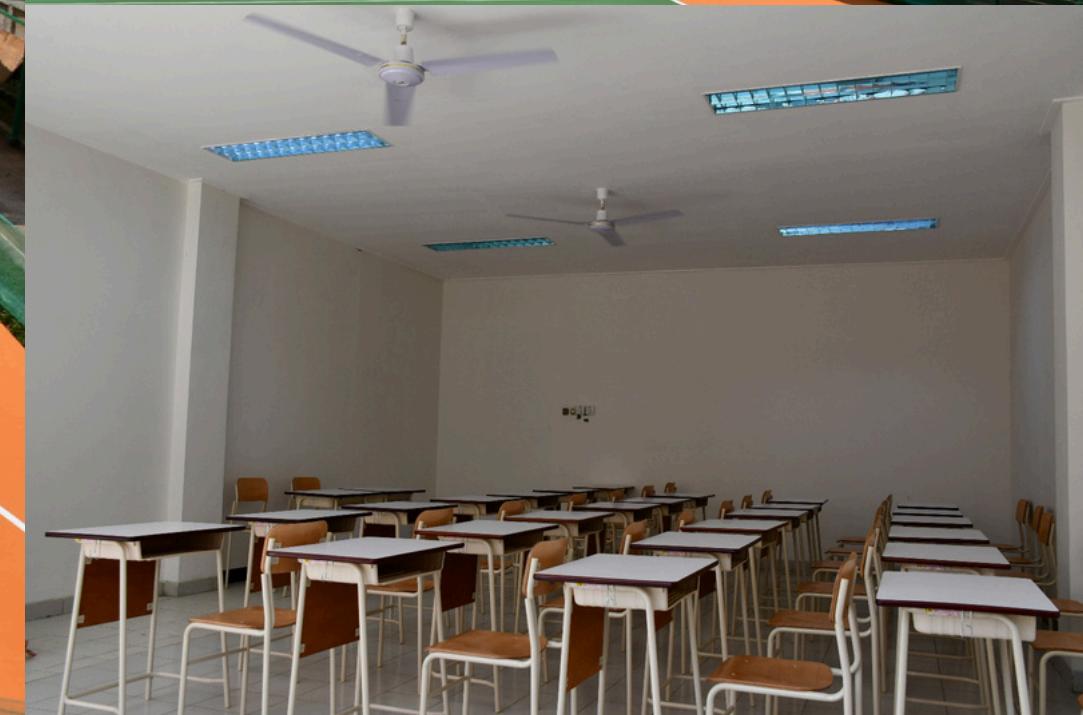


RUANG KELAS



ASRAMA PUTRA

Pelaksanaan Renovasi Bangunan yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat Sementara Tahun Ajaran 2025/2026 [1]



Lokasi : Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta

Kurikulum Sekolah Rakyat



Lulusan Sekolah Rakyat

- Nilai Akhlak Mulia dan Keagamaan
- Karakter Kepemimpinan
- Penguasaan Bahasa & Literasi Digital
- Keberdayaan dan *Entrepreneurship*
- Ketuntasan Akademik



disusun dalam
Kurikulum yang
dirancang Khusus
(taylor made)

Kurikulum Sekolah Rakyat

Program Persiapan (Learner Preparation)

- Kesiapan Fisik
- Kesiapan Mental
- Kesiapan Akademik

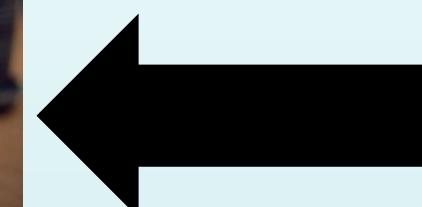
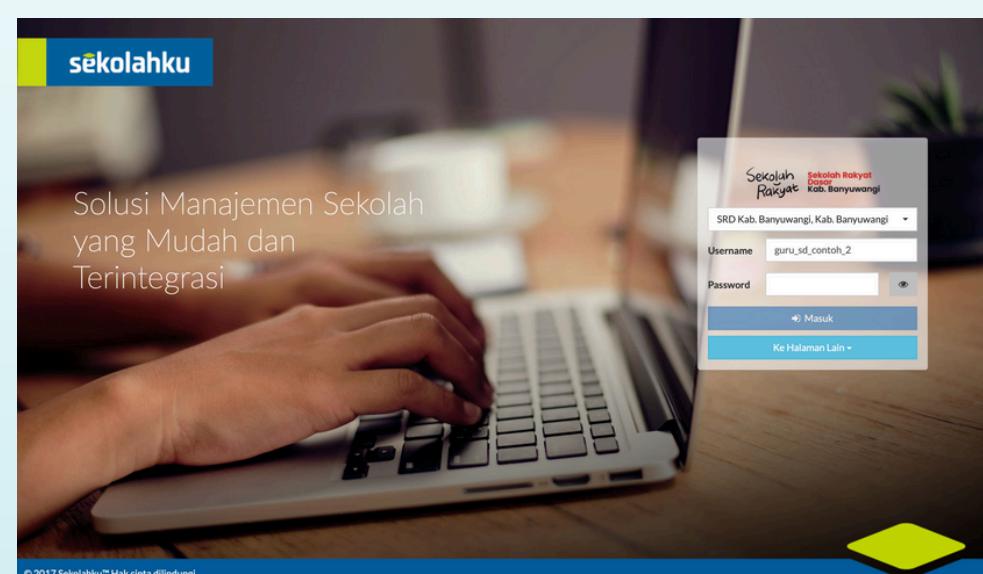
Talent
Mapping

Program Akademik

Mengikuti Standar Kurikulum Nasional:

- Intrakurikuler
- Kokurikuler
- Ekstrakurikuler

Rekap Latihan Soal						
No	Topik	Sub Topik	Judul Latihan Soal	Action	Status	Nilai
1	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Tahukah Kalian?		Belum Mengerjakan	
2	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Mengamati : Mengidentifikasi Isi Teks LHO		Belum Mengerjakan	
3	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Menanya : Mengidentifikasi Teks LHO		Belum Mengerjakan	
4	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Tahukah kalian?		Belum Mengerjakan	
5	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Menalar		Belum Mengerjakan	
6	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Menalar		Belum Mengerjakan	
7	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Mencoba : Mengidentifikasi Gagasan Pokok Teks LHO		Belum Mengerjakan	
8	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Tuliskan Aneka Sumber Belajarmu		Belum Mengerjakan	
9	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Mari Menyimpulkan: Identifikasi Teks LHO		Belum Mengerjakan	
10	TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI	Apa itu Teks Laporan Hasil Observasi?	Refleksi		Belum Mengerjakan	
11	TEKS LAPORAN HASIL	Apa itu Teks Laporan Hasil	Semoga Latihan		Belum	



dilengkapi dengan
LMS (Learning
Management System)

Program Asrama (Boarding)

- Penguanan Karakter
- Penguanan Spiritualitas
- Penguanan Cinta Tanah Air
- Penguanan Bahasa



SISWA SEKOLAH RAKYAT

Home Visit dan
Wawancara

13 JUNI 2025 (TAHAP 1)
3 JULI 2025 (TAHAP 2)

16-18 JUNI 2025 (TAHAP 1)
4-6 JULI 2025 (TAHAP 2)

19 JUNI 2025 (TAHAP 1)
7 JULI 2025 (TAHAP 2)

20 JUNI 2025 (TAHAP 1)
8 JULI 2025 (TAHAP 2)

1 JULI 2025 (TAHAP 1)
9 JULI 2025 (TAHAP 2)

14 JULI 2025

Penetapan Calon Peserta Didik Oleh Kepala
Daerah dan Pengumuman Calon Peserta Didik

Penetapan Peserta Didik
oleh Kepala Daerah

Pemeriksaan Kesehatan
Gratis (PKG)

Tahap 1a

63 titik

256 Rombel

Tahap 1b

37 titik

139 Rombel

10.434
SISWA
TERDAFTAR

DAYA
TAMPUNG
6.130

3.766
SISWA
TERDAFTAR

DAYA
TAMPUNG
3.625

- 3 Rombel SD
- 112 Rombel SMP
- 141 Rombel SMA

- 75 siswa SD
- 2.800 siswa SMP
- 3.225 siswa SMA

- 4 Rombel SD
- 53 Rombel SMP
- 82 Rombel SMA

- 100 siswa SD
- 1.310 siswa SMP
- 2.215 siswa SMA

Pengumuman Peserta
Didik yang diterima

Registrasi ulang dan pemanggilan peserta
didik ke asrama (Menyesuaikan kesiapan
sarana prasarana (timeline KemenPU))

8 JULI, 9.755 SISWA
AKAN DITETAPKAN
MENJADI SISWA
SEKOLAH RAKYAT, 14
JULI AKAN MULAI MASUK
ASRAMA

Profil Calon Peserta Didik



NAILA

NIK : 7371096412120006
NO. KK : 7371092003180009
TTL : MAKASSAR, 12/24/2012
UMUR :
JK : PEREMPUAN
ALAMAT : JL.PANDANG 4 NO.12 RT.003 RW.003 KEL. PANDANG
KEC. PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR
AGAMA : ISLAM

NAMA AYAH : SYAMSUL
NAMA IBU : NURLIA
PENGHASILAN : < 1 Juta
JUMLAH TANGGUNGAN : 5 ORANG



MUHAMMAD
UAFAR SYADATUL

NIK : 137100812120002
NO. KK : 137101912230003
TTL : KOTA PADANG, 8 AGUSTUS 2012
UMUR : 12 TAHUN
JK : LAKI - LAKI
ALAMAT : Lubuk lancing rt.003 rw.003 KEL. GURUN LAWEH
KEC. NANGGALO KOTA PADANG
AGAMA : ISLAM

NAMA AYAH : ROMI KURNIA PUTRA
NAMA IBU : DEVI SUSANTI
PENGHASILAN : < 1.5 Juta
JUMLAH TANGGUNGAN : 5



Devigucci
Infinix NOTE30



GURU DAN TENDIK SEKOLAH RAKYAT

**1.554 Guru PPPK
telah ditetapkan
melalui Permenpanrb 120/2025**

terdiri dari Guru Kelas dan Guru Agama, telah melalui seleksi PPG (kemendigdasmen) dan CAT (BKN).



**2.730 Tendik ASN
dengan skema Penugasan
telah ditetapkan**

terdiri dari Wali Asuh, Wali Asrama, Tata Usaha, Bendahara, Operator, Juru Masak, Keamanan dan Petugas Kebersihan

Berasal dari Penugasan ASN Kemensos, Pemda dan Kemenag

Tahap 1a



**53
Kepala
Sekolah**

Telah melakukan
Retret 5 Hari di
Pusdiklat
Kemensos,
bekerjasama
dengan TNI

Tahap 1b



**47
Kepala
Sekolah**

akan
melaksanakan
retret 5 Hari
pada 1 Juli



OPTIMALISASI SEKOLAH RAKYAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN



Pemerintah Daerah Kampanyekan Sekolah Rakyat



**Pesan Kunci Kampanye Sekolah Rakyat:
Memutus Kemiskinan Lewat Pendidikan**

➤ Memuliakan Keluarga Miskin, Mendorong Kebangkitan Wong Cilik

Kata Kunci:

- Memutus mata rantai kemiskinan
- Keluarga miskin
- Sekolah gratis berasrama
- Dibangun oleh negara
- Pendidikan adalah hak setiap masyarakat

“

Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi tempat dimana anak-anak belajar percaya bahwa mereka layak untuk bermimpi.

”

TERIMA KASIH

.....

